

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai entitas ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi lokal. Pembentukan BUMD di daerah akan mempunyai sinergi yang signifikan bagi perekonomian daerah karena akan memastikan bahwa BUMD beroperasi secara efektif, efisien dan bertanggung jawab menyediakan produk-produk berkualitas penting kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Selain itu, BUMD diharapkan dapat dipercaya sebagai sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah.

Dalam era otonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki keinginan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan mengelola potensi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperbaiki penyelenggaraan perekonomian lokal. Sebagai bagian dari perwujudan otonomi daerah yang nyata dan menyeluruh, perlu dilakukan penguatan sistem perekonomian, oleh karena itu perlu dibangun landasan bagi pendirian perusahaan-perusahaan daerah. Salah satu entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang umumnya hadir di setiap provinsi, kabupaten, dan kota adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam). Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam)

adalah badan usaha daerah yang bertugas dalam penyediaan dan distribusi air bersih kepada masyarakat umum.

Penelitian ini difokuskan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti Kabupaten Cianjur. Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur merupakan badan usaha milik daerah yang berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Perumdam ini beroperasi di sektor produksi dan distribusi air minum. Pendiriannya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5/HUK/D21.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 17 Tahun 1986 tanggal 1 Desember 1986. Status PDAM diubah menjadi Perumdam Kabupaten Cianjur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014, dan diperbaharui kembali pada tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 23 September 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti. Bentuk hukum ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2022 Perusahaan memiliki 68.870 pelanggan, yang terdiri dari 47.808 pelanggan aktif dan 20.862 pelanggan non aktif. Dari jumlah pelanggan tersebut sebanyak 4.000 pelanggan berasal dari pemasangan hibah air minum AUSAID, 8.750 pelanggan berasal dari pemasangan hibah air minum APBN, 8.148 pelanggan berasal dari hibah air minum APBD, dan 26.910 pelanggan berasal dari pemasangan regular perusahaan. Jumlah pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan layanan adalah pelanggan domestik 68.870

pelanggan, sedangkan untuk pelanggan non domestik tidak di masukan dalam perhitungan cakupan layanan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang terlayani diwilayah administrasi sebanyak 211.464 jiwa atau 8,32% dari jumlah penduduk sebanyak 2.542.793 jiwa. Sedangkan penduduk diwilayah teknis yang terlayani sebanyak 214.582 jiwa atau 10,81% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perusahaan sebanyak 1.985.248 jiwa. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam dokumen hasil reuiu RISPAM Tahun 2021-2041 menargetkan peningkatan cakupan pelayanan teknis perusahaan sebesar 63,74% dan target cakupan pelayanan wilayah administrasi sebesar 12,09% di akhir tahun 2022, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2022 Perusahaan belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional.

Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur sebagai penyedia air minum terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan air minum, baik dalam hal jangkauan layanan maupun volume air yang disediakan. Saat ini, belum semua rumah tangga di Kecamatan Cianjur tercakup oleh pelayanan Perumdam Tirta Mukti. Mayoritas dari mereka yang belum terlayani masih mengandalkan air tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, pertumbuhan penduduk di Kecamatan Cianjur akan menimbulkan tekanan terhadap penyediaan air minum yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan ekspansi usaha, kompleksitas kegiatan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan daerah semakin meningkat, membuat pengawasan terhadap seluruh operasional perusahaan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, mekanisme pencegahan kecurangan dalam proses operasional menjadi sangat

penting dalam konteks ini. Pencegahan kecurangan pada dasarnya merupakan upaya untuk menghalangi pelaku yang berpotensi melakukan kecurangan, membatasi peluang terjadinya, serta mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan (Suginam, 2016). Karena kompleksitas operasional dalam sebuah perusahaan, Top Management menghadapi keterbatasan dalam berkomunikasi dengan lini bawah di bagian operasional untuk mengevaluasi kinerja karyawan, meskipun sistem pengawasan tertentu telah diterapkan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memastikan apakah prosedur-prosedur yang telah ditetapkan telah dipatuhi. Keterbatasan komunikasi antara Top Management dan lini operasional dalam perusahaan ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dalam lingkungan internal (Syahputra, A, 2021).

Fenomena terkini mengenai kasus *fraud* yang terjadi di tahun 2023 adalah korupsi di PDAM Makassar yang berdampak pada pemberhentian secara tidak hormat kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan PDAM Makassar, kasus tersebut bermula karena PDAM Makassar mengalami kenaikan laba dalam rentang tahun 2016 hingga 2019, namun tidak ada pembahasan atau rapat direksi yang dilakukan untuk menentukan penggunaan laba dan pembagian laba. Selain itu, tidak ada pencatatan mengenai pembahasan ini dalam notulensi rapat. Keputusan hanya diambil oleh direksi berdasarkan rapat per bidang. Perihal keuangan, pembahasan hanya melibatkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar. Lebih lanjut, terdapat pembayaran tantiem dan pembagian hasil laba perusahaan yang merugikan negara sebesar lebih dari Rp 20 miliar. Dana tersebut tercium oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas pemeriksaan audit

keuangan tahun 2022, setelah ditemukan lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, lebih lanjut ditemukan adanya Penyimpangan terjadi dalam penggunaan laba untuk pembayaran tantiem dan bonus/jasa produksi, serta premi asuransi dwiguna Jabatan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Kondisi tersebut patut dipertanyakan keterlibatan Satuan Pengawas Internal yang seharusnya menjadi verifikator dalam transparansi Laporan Keuangan, namun dalam kasus PDAM Makassar seolah-olah Satuan Pengawas Internal tidak terlibat sama sekali dalam praktiknya (Sumber: Toraja. Tribun News).

Permasalahan lain pada PDAM terjadi pada PDAM Madiun, berawal dari kasus penyalahgunaan dana pelanggan rekening air oleh dua karyawan, yaitu tersangka J Kasubag Pengendali Rekening dan tersangka RE kasir merangkap supervisor kasir. Terdapat selisih laporan pembukuan bagian dengan sistem pencatatan rekening air pelanggan, tersangka merekayasa tagihan yang diterima dari pelanggan dengan nilai yang dicatat sebagai penerimaan PDAM. Rekayasa tersebut telah berjalan hampir satu tahun, yang mana jumlahnya mencapai Rp729.000.000, penggelapan tersebut ditemukan selisih pembukuan terdeteksi di PDAM Kota Madiun, berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan melibatkan Inspektorat Kota Madiun pada awal tahun 2023 (Sumber: Surabaya. Kompas.com).

Kasus lain terjadi pada PDAM Bone Bolango yang telah menelan kerugian negara sebesar Rp24,4 Miliar. Kronologi dari kasus tersebut adalah merekayasa realisasi penerima manfaat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak sesuai alamat domisili dan berada di luar wilayah administrasi Kab Bone Bolango.

Tersangka merekayasa penerima pemasangan pipa MBR, dan membuat tagihan fiktif di sebagian rumah yang sebenarnya tidak dipasang pipa pemasangan baru MBR dengan alih-alih rumah tersebut sebenarnya adalah pelanggan lama, tersangka hanya mengganti asesoris dari pipa dan catatan meter saja, akal-akalan tersebut berguna untuk menghindari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo. Terakhir tersangka membuat rekening tagihan fiktif yang telah dilakukan pemasangan pipa baru MBR. Pola tersebut sudah berjalan dari tahun 2018 hingga 2021 sampai diketahui oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo (Sumber: Antara News).

Kecurangan yang terjadi di PDAM tersebut jelas merugikan banyak pihak, baik secara materiil maupun non-materiil di dalam perusahaan, serta merusak reputasi dan kredibilitas PDAM. Fenomena ini merupakan contoh konkret dari kasus kecurangan yang terjadi karena kurangnya efektivitas pengendalian internal dan audit internal di perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pengendalian internal yang lebih kuat. Dengan SPI yang menjalankan tugas pokok dan perannya secara efektif, organisasi dapat mencegah kerugian finansial, melindungi aset dari korupsi, kelalaian, kebiasaan buruk yang dibiarkan berlangsung, penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan. Dengan demikian, organisasi dapat menghindari kerugian yang dapat dicegah dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Menurut Tuanakotta (2014: 28) *Fraud* merupakan perilaku ilegal yang ditandai dengan tindakan penipuan, penyembunyian informasi, atau merusak kepercayaan tanpa mengandalkan kekerasan atau kekuatan fisik. Tindakan ini

dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan memperoleh uang, properti, atau layanan secara tidak sah, menghindari kewajiban pembayaran, atau melindungi kepentingan bisnis pribadi. Untuk mencegah potensi terjadinya kecurangan, audit internal dalam perusahaan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal ini melibatkan evaluasi sistem dan prosedur yang telah disusun dengan baik dan terstruktur, serta pemeriksaan pelaksanaannya secara cermat.

Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur menerapkan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai bagian dari fungsi pengendalian sangat penting. Keberadaan SPI dalam suatu organisasi memiliki peran yang krusial dalam mengawasi kelangsungan dan keakuratan arah organisasi. Menurut Pebianti (2018), salah satu tugas utama SPI adalah melakukan audit internal. Audit Internal ini tidak hanya meningkatkan kegiatan operasional organisasi, tetapi juga melakukan kegiatan audit dan pemberian masukan. Tujuan dari audit internal adalah memberikan bantuan kepada manajemen dalam pelaksanaan tugasnya dengan memberikan analisis, evaluasi, rekomendasi, dan komentar terkait dengan aktivitas yang diselidiki. Pertumbuhan bisnis dapat membatasi kemampuan manajemen untuk memantau masalah operasional, sehingga menjadikan audit internal semakin penting.

Menurut Hery (2017) Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset dan kepentingan perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi akuntansi, dan menjamin kepatuhan karyawan terhadap semua aturan, undang-undang, dan kebijakan

manajemen. Pengendalian internal yang baik dan kokoh bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan akuntansi di perusahaan. Dalam menangani masalah kecurangan akuntansi, monitoring yang efektif diperlukan untuk memastikan pengendalian internal yang optimal dan hasil monitoring yang baik (R.P Yanti, 2023).

Berdasarkan tujuan dan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal dan pengendalian internal memegang peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan. Audit internal melibatkan auditor internal perusahaan yang mengevaluasi baik aspek finansial maupun non-finansial. Pengendalian internal yang efektif dan kuat memiliki potensi untuk mengurangi risiko kecurangan. Kedua mekanisme tersebut bertujuan untuk mencegah serta mengurangi risiko penipuan, kesalahan, dan tindakan yang berdampak buruk pada suatu organisasi.

Satu indikator untuk menilai profesionalisme Auditor Internal adalah keberadaan sertifikasi Audit Internal yang dikenal sebagai *Qualified Internal Auditor (QIA)*. Namun, hanya memiliki sertifikasi ini saja belum cukup karena perlu mengevaluasi kinerja Auditor Internal dalam menjalankan tugasnya dan memberikan rekomendasi yang efektif dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kehadiran auditor internal yang berprofesionalisme sangatlah penting dalam struktur organisasi perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, penulis memfokuskan perhatian pada fenomena kecurangan. Didorong oleh latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut tentang audit internal. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Satuan Kerja Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Pada Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terjadi *fraud* pada lingkungan BUMD
2. Satuan Kerja Audit Internal belum efektif dalam pencegahan *Fraud*

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar Peranan Satuan Kerja Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud*.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan penulis dan mendapatkan informasi yang mendukung tentang peran Satuan Kerja Audit Internal dalam pencegahan kecurangan sebagai materi untuk penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka riset ini bertujuan untuk mengetahui peranan Satuan Kerja Audit Internal dalam pencegahan *fraud* pada Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi mahasiswa akuntansi untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya audit internal dalam upaya pencegahan *fraud*. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan baru yang dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang ini.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak perusahaan, yang dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja audit internal dan efektivitas pengendalian internal. Dengan demikian, diharapkan kualitas audit internal dapat meningkat dan pengendalian internal menjadi lebih efektif dan kuat, terutama dalam upaya pencegahan *fraud* dalam operasional perusahaan. Semua ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

1.6 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang diterapkan secara internal dalam organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas sebagai bentuk dukungan terhadap perusahaan. Pemeriksaan internal melakukan evaluasi independen dalam organisasi untuk mengkaji kembali kegiatan-kegiatan terutama di bidang akuntansi, keuangan, dan operasional lainnya sebagai landasan untuk memberikan dukungan kepada manajemen. (Hery, 2017).

Audit internal adalah aktivitas asurans dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang rancangannya untuk memberi nilai tambah serta meningkatkan operasi organisasi. Berikut adalah Standar Atribut yang di kemukakan oleh *The Institute of Internal Audit (2017)*:

1. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab
 - a. Mengakui Panduan yang Diwajibkan pada Piagam Audit Internal
2. Independensi dan Objektivitas
 - a. Independensi Organisasi
 - b. Objektivitas Individual
 - c. Pelemahan terhadap Independensi atau Objektivitas
3. Kecermatan dan Kehati-hatian
 - a. Kecakapan
 - b. Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)
 - c. Pengembangan Profesional Berkelanjutan
4. Jaminan Kualitas dan Pengembangan Program
 - a. Persyaratan Program Asurans dan Peningkatan Kualitas
 - b. Pelaporan Program Asurans dan Peningkatan Kualitas
 - c. Penggunaan frasa
 - d. Pengungkapan Ketidaksesuaian

Fraud adalah kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*)

kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Kecurangan laporan keuangan yang material dapat berdampak buruk secara signifikan terhadap nilai pasar, reputasi, dan kemampuan entitas untuk mencapai tujuan strategisnya. Sejumlah kasus yang dipublikasikan secara luas telah terjadi meningkatkan kesadaran akan dampak penipuan pelaporan keuangan dan telah menyebabkan banyak organisasi menjadi lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mencegah terjadinya kecurangan. Penyalahgunaan aset, meskipun seringkali tidak material terhadap laporan keuangan, namun dapat mengakibatkan kerugian besar bagi suatu entitas jika ada tindakan yang tidak jujur.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:2), mengartikan *Fraud* sebagai berikut:

“*Fraud*, sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material”.

AICPA, dalam kerjasama dengan berbagai organisasi profesional, telah merilis "Program dan Pengendalian Antifraud untuk Manajemen: Sebuah Panduan untuk Membantu dalam Pencegahan, Antisipasi, dan Deteksi Kecurangan." Panduan ini menyoroti tiga komponen utama untuk menghindari, memprediksi, dan mengungkap kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh Arens et al. (2017:407) dalam "Jasa Audit dan Assurance Services":

1. Budaya kejujuran dan etika mempunyai nilai yang tinggi
2. Tanggung jawab Direksi dalam menilai risiko kecurangan
3. Pemantauan oleh komite audit.

Berdasarkan kutipan tersebut, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi kecurangan dengan cara yang paling efektif, perusahaan harus menerapkan program-program dan pengendalian-pengendalian antikecurangan yang didasarkan pada nilai-nilai inti perusahaan. Membangun budaya kejujuran dan etika yang tinggi melibatkan enam elemen berikut ini.
 - a. Pemimpin Manajemen dan Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam perilaku yang etis di perusahaan. Kejujuran dan integritas yang ditunjukkan oleh manajemen mendorong seluruh pegawai dalam organisasi tersebut untuk juga bersikap jujur dan berintegritas. Manajemen tidak bisa mengharapkan perilaku yang berbeda dari bawahannya jika mereka sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Melalui tindakan dan komunikasi mereka, manajemen dapat menegaskan bahwa perilaku yang tidak jujur dan tidak etis tidak dapat diterima, bahkan jika mungkin menguntungkan bagi perusahaan.
 - b. Menyusun Suasana Kerja yang Menguntungkan. Penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran lebih jarang terjadi ketika karyawan merasa positif terhadap tempat kerja mereka, dibandingkan dengan saat mereka merasa tidak dihargai,

terancam, atau diabaikan. Suasana kerja yang positif dapat meningkatkan moral karyawan, sehingga mengurangi kemungkinan mereka melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

- c. Untuk mencegah kecurangan, perusahaan yang berhasil harus mengimplementasikan kebijakan seleksi yang efektif untuk mengurangi risiko mempekerjakan dan mempromosikan individu dengan tingkat kecurangan yang rendah, terutama untuk posisi-posisi kunci. Kebijakan tersebut bisa mencakup pemeriksaan latar belakang bagi calon karyawan atau kandidat yang akan dipromosikan ke posisi strategis. Pemeriksaan latar belakang meliputi pengecekan riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan referensi pribadi, termasuk penilaian mereka terhadap nilai dan etika perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan.
- d. Pelatihan harus diberikan kepada semua karyawan baru terkait harapan perusahaan terhadap perilaku etis. Mereka harus diberi pengertian bahwa mereka bertanggung jawab untuk melaporkan tindakan curang yang mereka saksikan atau curiga telah terjadi, serta cara yang benar untuk melaporkannya.
- e. Verifikasi Secara berkala, sebagian besar perusahaan meminta karyawannya untuk secara teratur mengonfirmasi kewajiban mereka untuk mematuhi kode etik. Karyawan diminta untuk

menyatakan pemahaman mereka terhadap harapan perusahaan dan kepatuhan terhadap kode etik, serta kesadaran mereka terhadap segala bentuk pelanggaran. Verifikasi ini membantu dalam penegakan kebijakan kode etik dan juga memperkuat pencegahan terhadap kecurangan atau pelanggaran etika oleh karyawan.

f. Penegakan Aturan Para karyawan harus menyadari bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka jika melanggar kode etik perusahaan. Penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik, tanpa memandang status jabatan pegawai yang terlibat, memberikan pesan yang jelas kepada seluruh staf bahwa kepatuhan terhadap kode etik dan standar etika lainnya adalah hal yang sangat penting dan diharapkan. Penyelidikan menyeluruh terhadap semua pelanggaran dan penanganan yang konsisten dan tepat dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah kecurangan.

2. Kewajiban Manajemen dalam Menilai Risiko Kecurangan. Kecurangan tidak dapat terjadi tanpa adanya peluang yang tersedia untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan tersebut. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengenali dan mengevaluasi risiko kecurangan, melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi risiko-risiko yang teridentifikasi, dan mengawasi sistem pengendalian internal yang dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan.

- a. Mengenali dan Menilai Risiko Kecurangan. Pemantauan yang efisien terhadap kecurangan dimulai dengan pengakuan manajemen akan kemungkinan terjadinya kecurangan, dan bahwa hampir semua karyawan memiliki potensi untuk bertindak tidak jujur jika diberikan kesempatan. Pengakuan ini meningkatkan kemungkinan penerapan program dan pengendalian yang efektif untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan.
- b. Mengurangi Risiko Kecurangan. Tanggung jawab manajemen adalah merancang dan melaksanakan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan. Mereka dapat memodifikasi kegiatan dan proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan untuk mengurangi dorongan untuk melakukan kecurangan.
- c. Memeriksa Program dan Pengendalian Pencegahan Kecurangan. Untuk area-area dengan tingkat risiko kecurangan yang tinggi, manajemen perlu secara berkala mengevaluasi apakah program dan pengendalian antikecurangan yang sesuai telah diterapkan dan berjalan efektif. Audit internal memiliki peran utama dalam memeriksa kegiatan untuk memastikan bahwa program dan pengendalian antikecurangan berjalan dengan baik. Kegiatan audit internal dapat mencegah serta mendeteksi kecurangan.

3. Pengawasan oleh Komite Audit. Komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan sistem pengendalian internal di organisasi. Dalam menjalankan perannya, komite audit mempertimbangkan kemungkinan bahwa manajemen mengabaikan pengendalian internal dan memonitor proses evaluasi risiko kecurangan, serta program dan pengendalian untuk mencegah kecurangan. Komite audit juga membantu menetapkan standar yang jelas tentang pentingnya integritas dan perilaku etis dengan menolak sepenuhnya toleransi terhadap segala bentuk kecurangan.

Jika kinerja SKAI pada suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya *error* dan *fraud* semakin besar. Sebaliknya, jika kinerja SKAI efektif, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalkan. Kinerja yang efektif dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki dampak signifikan dalam upaya mencegah kecenderungan kecurangan, karena dengan adanya SKAI, pemeriksaan terhadap pekerjaan seseorang akan dilakukan secara otomatis oleh pihak lain.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan referensi dari Jurnal Ilmiah Akuntansi dan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Detail dari referensi yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut:

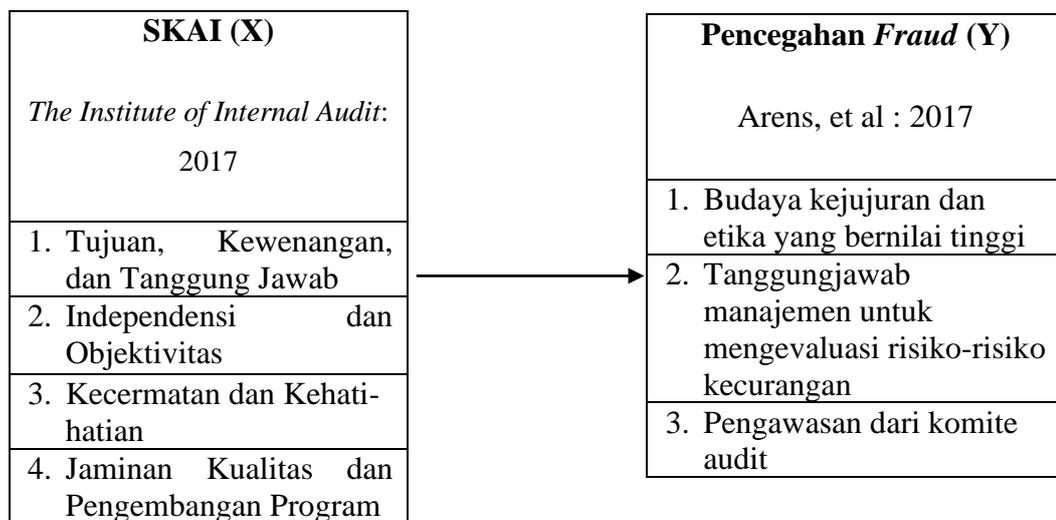
Tabel 1.1
Studi Empiris

No	Peneliti & Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ai Devi Sri Mulyani (2020) Pengaruh Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Kas Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.	Untuk memahami dampak dari kehadiran audit internal terhadap upaya mencegah penipuan kas di PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit internal berpengaruh dalam pencegahan <i>fraud</i> , pelaksanaan Audit Internal di PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dijalankan dengan baik.	Variabel independen yang diteliti adalah Satuan Pengawasan Internal	Spesifik pada variabel dependen menggunakan bagian khusus, yaitu pencegahan kecurangan kas
2.	Askiatul Amila (2018) Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud)	Untuk mengetahui peranan audit internal dan pengendalian dalam pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) di BNI Syariah Kantor Cabang Jember.	Audit Internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Sama-sama untuk menilai tingkat pengaruh yang dimiliki oleh audit internal dalam upaya menghindari terjadinya kecurangan.	Objek penelitian yaitu Sektor Perbankan
3.	Airis Nisa (2014), Pengaruh Audit Internal terhadap Pendeteksian dan Pencegahan <i>fraud</i>	Untuk menilai pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>)	Audit Internal berpengaruh terhadap pendeteksian dan pencegahan <i>fraud</i>	Sama-sama untuk menilai seberapa besar pengaruh Audit internal terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Metode Penelitian kualitatif, sedangkan Variabel X yang diteliti Audit Internal dan Sistem

No	Peneliti & Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
					Pengendalian Intern.
4.	Rio Sempana (2015), Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung	Audit Internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , Pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung, Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena terdapat beberapa masalah.	Sama-sama untuk mengetahui besar pengaruh audit internal dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Objek penelitian yaitu Sektor pemerintahan, Metode Penelitian deskriptif dan verifikatif, Teknik pengumpulan Teknik Lapangan (<i>Field Research</i>) dan Studi kepustakaan (<i>Library Research</i>)
5.	Suginam (2016) Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT. Tolan Tiga Indonesia	untuk mengetahui unsur-unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh orang dalam dan dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dan secara langsung maupun tidak langsung	Internal audit perusahaan memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan fraud	Sama-sama untuk menilai besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Objek penelitian yaitu Sektor Perusahaan Swasta

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori diatas, maka peneliti mencoba menggambarannya dalam suatu bagian kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peneliti. Kerangka pemikiran atau model analisis diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Hipotesis adalah satu kesimpulan sementara yang belum final; jawaban sementara; dugaan sementara; yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel (Nurdin dan Hartati: 2019).

Dari pernyataan ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis adalah sebuah prediksi awal yang perlu diuji kevalidannya.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mendapatkan hipotesis sebagai berikut:

**“Peranan Satuan Kerja Audit Internal Berpengaruh Dalam Pencegahan
Fraud”**

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 162 Cianjur. Penelitian ini dimulai Bulan Oktober 2023 – selesai.